

## **KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP VIETNAM STUDI KASUS PENCABUTAN EMBARGO SENJATA**

**Yudistira<sup>1</sup>**  
**Nim. 1102045207**

### ***Abstract***

*Arms embargo on Vietnam is one of the foreign policy of the United States of America after Vietnam War, as a form of unsupportiveness towards communism regime in Vietnam. This embargo had started since 1975, and lifted completely on May 23<sup>rd</sup>, 2016, during US President Barrack Obama Visit to Vietnam. This abolishment of embargo considered as a strategic move because of the rising tension from China, involving the conflict in South China Sea. The purpose of this study was to determine the US foreign policy-making in revoking the arms embargo on Vietnam during Barrack Obama's administration from 2009-2016. This study used qualitative research methods. In this study, the author use the concept of foreign policy making, and arms embargo concepts to perform the analysis in this study. Data analysis technique used is qualitative analysis. This revokement of arms embargo was taken to hold the rising power of China, which started since the normalization of trade with Vietnam in 1995, to maintain the overpowering china's military power in South China Sea.*

**Keywords:** : US Foreign Policy, Arms Embargo, Vietnam

### **Pendahuluan**

Vietnam merupakan negara yang terletak di bagian timur semenanjung Indocina di Asia Tenggara. Negara yang pernah mengalami perang saudara antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, terjadi pada tahun 1965, yang diberi kode *Operation Rolling Thunder* (oleh Amerika Serikat) dan sedikit banyak dipengaruhi oleh perang dingin yang terjadi oleh dua kubu besar yakni AS dan Uni Soviet. Hal itu terlihat dari kubu Vietnam Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat. Peperangan tersebut kemudian berakhir dengan kemenangan dipihak Vietnam Utara.

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: indrayudistira@gmail.com

Pasca peperangan berakhir Amerika Serikat memberlakukan sanksi kepada Vietnam sebagai bentuk bahwa Amerika Serikat tidak mendukung berdirinya rezim komunis di Vietnam. Beberapa sanksi tersebut berupa embargo senjata dan juga embargo ekonomi. Sanksi embargo senjata tersebut berlaku pada tahun 1975. Tujuan dari embargo senjata ini untuk mencegah pemerintahan komunis Vietnam untuk memiliki persenjataan yang diproduksi baik oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

Seiring perkembangan zaman, Hubungan AS dan Vietnam membaik, diawali dengan program pertukaran informasi mengenai tentara AS yang ditahan dan tentara yang hilang dalam pertempuran pada perang Vietnam. Lalu pada tahun 1995 normalisasi hubungan diplomatik diresmikan dengan membuka kedutaan besar di masing-masing negara. Setelah proses normalisasi kemudian kedua negara menjalin kerja sama dalam berbagai bidang, dan terjadi perubahan pada tahun 2014 ketika Amerika Serikat secara bertahap mencabut embargo senjata terhadap Vietnam. Penyediaan senjata-senjata tersebut bertujuan untuk meningkatkan sistem keamanan maritim sehingga kemampuan pengawasan maritim Vietnam menjadi lebih besar. Pencabutan embargo kemudian sepenuhnya terjadi pada tanggal 23 Mei 2016 bersamaan dengan kunjungan presiden Barack Obama di Vietnam. Ini mengartikan bahwa semua jenis perdagangan senjata dengan Vietnam di perbolehkan termasuk penjualan dan ekspor senjata mematikan dan pertahanan angkatan laut.

Tertariknya kedua negara untuk melakukan normalisasi hubungan dalam bidang pertahanan dan keamanan juga di latarbelakangi oleh kondisi pertahanan keamanan negara masing-masing yang disertai kepentingan nasional masing-masing negara. Salah satu kepentingan dari kedua negara terkait dengan konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan. Vietnam membutuhkan tambahan peralatan untuk menunjang kekuatan maritimnya untuk menghadapi eskalasi konflik di kawasan tersebut, sedangkan AS memiliki hampir semua alat pertahanan dan keamanan yang dibutuhkan oleh Vietnam dan juga memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas jalur tersebut sebagai jalur perdagangan internasional.

Konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan merupakan sengketa perebutan wilayah kepulauan *Spratly* dan *Paracel* yang diperkirakan memiliki luas 244.700 km<sup>2</sup> dan terdiri dari sekitar 230 pulau yang sebagian besar merupakan gugusan karang. Sengketa ini dilatarbelakangi akibat penemuan minyak dan gas bumi di wilayah tersebut yang diperkirakan memiliki jumlah cadangan yang mencapai 17,7 miliar ton. Beberapa negara kemudian mengklaim kepemilikan wilayah tersebut seperti Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina dan Brunei Darussalam.

Negara-negara tersebut kecuali Brunei Darussalam memiliki klaim dan pemberian nama terhadap pulau-pulau di kepulauan *Spratly*, sementara Brunei Darussalam hanya mengklaim wilayah laut di kepulauan *Spratly* sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negaranya. Selama klaim tersebut berlangsung, Cina juga terus meningkatkan kekuatan alutsista militernya. Selain melalui pembelian, Cina termasuk negara yang sukses dalam mengembangkan sistem persenjataannya secara mandiri. Dengan superioritas tersebut Cina semakin agresif dalam menetapkan hak milik di teritorial LCS. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bukan hanya negara-negara

ASEAN yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut. Negara seperti AS juga memiliki kepentingan di wilayah tersebut sebagai jalur perdagangan internasional.

Namun Amerika Serikat sebagai pihak yang juga memiliki kepentingan tidak dapat melibatkan diri secara langsung karena bukan merupakan pihak yang mengklaim wilayah teritorialnya. Sehingga momentum konflik di LCS dan modernisasi kekuatan militer Cina tersebut lalu menjadi titik temu antara kepentingan AS dan Vietnam untuk menjalin babak baru dalam kerjasama kedua negara yang sebelumnya hanya dalam bidang ekonomi lalu meluas dalam bidang pertahanan keamanan dalam rangka menghadapi eskalasi konflik di LCS dan untuk mengantisipasi kekuatan militer Cina. Perlu diketahui bahwa Vietnam merupakan negara yang sistem pemerintahannya menganut paham komunisme, sedangkan AS merupakan negara yang melahirkan paham demokrasi. Fakta tersebut kemudian menjadi menarik untuk diteliti karena AS mengambil risiko dengan mencabut embargo senjata terhadap negara yang berbeda paham. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan kebijakan luar negeri AS sehingga terjadi pencabutan embargo senjata tersebut.

### **Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

#### ***Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri***

Teori pembuatan keputusan luar negeri William D. Coplin yang ditulis dalam bukunya yaitu *Introduction of Internasional Politic* (2003:30), yang menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri adalah hasil dari beberapa pertimbangan yang mempengaruhi para pembuat kebijakan tersebut. Beberapa pertimbangan tersebut yakni adalah kondisi politik dalam negeri, kemudian kapabilitas ekonomi dan militer serta konteks internasional (2003:167), yaitu posisi khusus suatu negara dengan negara lain.

1. Situasi Politik Dalam Negeri, yang membahas keterkaitan antara keputusan situasi politik dalam negeri terhadap kebijakan luar negeri yang dibuat, menurut Coplin terdapat asumsi yang mendasar tentang perbedaan yang bersifat lintas nasional. Ketika kebijakan luar negeri dibuat, ada aktor-aktor politik dalam negeri yang mempengaruhi para pembuat kebijakan. Aktor-aktor yang mempengaruhi ini disebut Coplin sebagai "*Policy Influencer*". "*Policy Influencer*" ini merupakan pendukung rezim tertentu dalam suatu negara. Terjadi hubungan secara timbal balik antara pembuat kebijakan dengan para "*Policy Influencer*".
2. Kemampuan Ekonomi dan Militer, yang dapat menjadi penentu sejauh mana negara tersebut akan dipandang. Negara yang kuat tentu dapat lebih aktif dalam "panggung" internasional. Atau dapat dikatakan memiliki posisi tawar yang lebih tinggi bahkan ketika melakukan suatu negosiasi. Amerika Serikat adalah negara yang memiliki kemampuan ekonomi dan militer yang sangat maju, berbeda dengan jauh dengan Vietnam. Selain itu dalam konflik yang berkembang di LCS, kekuatan militer Vietnam jauh tertinggal dari Cina sehingga kebijakan pencabutan embargo oleh AS menjadi sangat dibutuhkan mengingat situasi tersebut.

3. Konteks Internasional, yang memiliki kaitan dengan situasi geopolitik pada saat merumuskan kebijakan luar negeri. Menurut Coplin ada tiga elemen dasar ketika menjelaskan dampak konteks internasional terhadap kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomi dan politis.

Ketiga poin tersebut kemudian menjadi elemen penting yang ikut menghasilkan keputusan dari AS untuk mencabut kebijakan embargo senjatanya terhadap Vietnam. Meskipun kontroversial mengingat Vietnam merupakan negara yang menganut paham komunis dalam menjalankan pemerintahannya.

### ***Konsep Embargo Persenjataan***

Embargo adalah sebuah tindakan secara personal ataupun secara kolektif oleh negara terhadap negara lain untuk menciptakan sebuah efek kepatuhan (*compliance*) dari negara yang menjadi obyek penerapan embargo. Menurut *Blackwell Law and Dictionary*(2008:418) disebutkan bahwa embargo persenjataan merupakan “...*a proclamation of order state usually issued in time of war or threatening hostile, prohibiting the departure of ship or goods from some or all the ports such state until further others*”, atau bila diterjemahkan adalah bahwa sebuah proklamasi atau perintah dari suatu negara biasanya dikeluarkan ketika perang atau ancaman permusuhan yang melarang perginya kapal dan barang dari beberapa pelabuhan negara tersebut sampai ada perintah selanjutnya.

Penerapan embargo persenjataan dijalankan dengan sikap dan pertimbangan yang sangat hati-hati karena ini berkaitan dengan efek domino (*multiplier effect*) yang nantinya akan terjadi, bukan hanya menimpa negara-negara yang menjadi obyek embargo persenjataan tersebut, namun juga eksistensi negara eksekutor (pelaksana embargo). Itulah sebabnya embargo persenjataan sebelumnya biasanya diawali dengan penerapan sanksi yang bersifat (*soft sanction*), di antaranya pengiriman nota protes, penarikan duta besar hingga pemutusan hubungan diplomatik(2015:63-64).

Embargo persenjataan dijalankan oleh negara yang memiliki posisi tawar (*bargain position*) yang lebih tinggi sehingga akan membangun sebuah *effect leadership*, sedangkan negara yang menjadi obyek penerapan sanksi akan membentuk sebuah konkordan (pengikutan) untuk dapat melepaskan sanksi. Implementasi embargo persenjataan bersifat relatif, namun umumnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu (2015:63-64):

1. Penghentian transfer alutsista (peralatan utama sistem persenjataan) secara total.
2. Penghentian suku cadang dan elemen pendukung dari alutsista (peralatan utama sistem persenjataan) secara total.
3. Penghentian tenaga ahli dan transfer teknologi dari alutsista (peralatan utama sistem persenjataan) secara total.

Makna penting dari tujuan embargo persenjataan adalah kepatuhan atau marginalisasi suatu negara agar terpisah dari konstelasi politik internasional, namun persoalan dilematis muncul ketika negara *aggressor* (penerap sanksi embargo) dihadapkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sulit. Pada era milenium ketiga persoalan politik keamanan yang berkembang bukan hanya masalah konflik secara terbuka, namun

telah muncul apa yang disebut dengan *extraordinary crime* dan *extra ordinary threatening*, diantaranya terorisme, hingga proliferasi persenjataan.

David Gootnick dalam proposisinya tentang embargo persenjataan menyebutkan bahwa munculnya kekuatan-kekuatan baru akan mengubah tatanan dunia. Saat ini (era globalisasi) telah muncul China, Rusia dan beberapa negara lain yang dapat menjadi alternatif bagi negara-negara dunia ketiga untuk melepaskan diri dari embargo persenjataan Amerika Serikat. Untuk itu, Amerika Serikat di akhir era kepemimpinan George W. Bush hingga era Barack Obama mulai mereformasi kebijakan luar negerinya, termasuk dengan mencabut penerapan embargo persenjataan di beberapa negara dunia. Diplomasi merupakan usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasional di kalangan masyarakat internasional (K.J. Holsti, 1984). Upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam meningkatkan pariwisata Indonesia dalam dunia internasional ini bertujuan untuk mempromosikan potensi pariwisata Indonesia kepada masyarakat internasional yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun juga berbagai kalangan yang turut serta berpartisipasi dalam mempromosikan pariwisata Indonesia, seperti lembaga-lembaga swasta, pengusaha, media.

### **Metodologi Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif eksplanatif. Dimana penulis menggambarkan proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan menjelaskan alasan pengambilan kebijakan tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil browsing data melalui jaringan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka. Teknik analisis yang digunakan teknik analisis data kualitatif yaitu penulis menganalisis data sekunder yang kemudian menggunakan teori dan konsep untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang sedang diteliti oleh penulis yaitu pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan studi kasus pencabutan embargo persenjataan oleh Amerika Serikat atas Vietnam.

### **Hasil Penelitian**

Implementasi pencabutan embargo persenjataan atas Vietnam menjadi bagian penting mekanisme kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dengan berbagai aktor yang terlibat. Salah satunya adalah partai politik pengusung kepemimpinan Barack Obama (Partai Demokrat). Pencabutan ini sejalan dengan faktor ekonomi di Amerika Serikat yang berusaha mengembangkan ekonominya di kawasan Asia Tenggara, memperbaiki citra Amerika Serikat di mata dunia yang seringkali cenderung menggunakan metode *hard diplomacy*, serta mengantisipasi eskalasi konflik di laut Cina selatan dan kekuatan militer Cina. Daerah Laut Cina Selatan yang dewasa ini menjadi sorotan dunia merupakan wilayah rawan konflik yang diperebutkan negara-negara disekitarnya.

***Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Pencabutan Embargo Persenjataan Terhadap Vietnam***

Amerika Serikat merupakan negara yang secara konsisten menerapkan nilai-nilai demokrasi. Pemerintahannya juga mengadopsi sistem *check and balance* yang berisi tentang pemisahan kekuasaan, di mana tidak ada satu pun cabang pemerintahan yang memiliki cabang dominan. Hakikat dari prinsip *checks and balances* sendiri adalah untuk menghilangkan sekat-sekat pemisahan *cultural* maupun *structural* antara legislatif, eksekutif maupun yudikatif di Amerika Serikat. Sehingga di antara lembaga-lembaga yang ada terdapat saling keterhubungan dan ketergantungan yang erat satu sama lain. Lembaga pemerintahan di Amerika Serikat (*Legislative, Executive, and Judicial*) masing-masing mempunyai kewenangan yang sama, dan setiap lembaga mengawasi maupun diawasi lembaga lainnya. Sehingga proses pembuatan kebijakan tidak hanya menekankan pada kekuasaan dan legitimasi pihak eksekutif, khususnya presiden, namun juga legislatif hingga mempertimbangkan kelompok kepentingan, termasuk mempertimbangkan berbagai aspirasi dari kelompok oposisi, meskipun ini bukanlah suatu hal yang mutlak. Proposisi ini juga berlaku bagi kebijakan Amerika Serikat terhadap Vietnam, terkait dengan pencabutan embargo senjata.

Sebagian besar proses dan mekanisme pembuatan kebijakan Amerika Serikat pada kebijakan luar negeri selalu berawal dari inisiatif pemerintah (eksekutif) baik presiden, menteri ataupun birokrat-institusi yang setara untuk kemudian masuk dalam pembahasan Kongres agar dapat ditolak atau disetujui ratifikasinya dan yang terakhir adalah pembahasan pada level senat (*House of Representatives*) sehingga dapat diputuskan apakah akan menjadi regulasi kebijakan luar negeri atau tidak. Sekitar 78-83% kebijakan luar negeri pasca berakhirnya perang dingin (*coldwar*) digagas oleh eksekutif. Sedangkan pihak-pihak yang terlibat sebelum masuk dalam pembahasan pada level presiden berasal dari empat lembaga/ institusi penting, masing-masing adalah :

1. Departement of State
2. Departement of Defense
3. National Security Council.
4. Central Intelligence Agency.

Pencabutan embargo oleh Amerika Serikat atas Vietnam sebenarnya telah dibicarakan pada akhir masa kepemimpinan George W. Bush pada bulan Juli 2008, di mana Bush telah menawarkan penghentian embargo sebagai bentuk *soft diplomacy* pasca kegagalan invasi Amerika Serikat bersama dengan pasukan multinasional ke Irak dan Afghanistan tahun 2003. Akan tetapi pada masa kepemimpinan Barack Obama pada Januari 2015, *US Department of State* memberikan maklumat kepada presiden Obama tentang perencanaan normalisasi kerja sama luar negeri dari *Enlarging US Global Relationship*, yaitu revitalisasi dan pengalokasian bantuan luar negeri ke negara-negara Eropa Timur, di antaranya Latvia, Republik Georgia dan Ukraina, perencanaan normalisasi hubungan diplomatik Amerika Serikat dan Kuba dan pencabutan embargo ke Vietnam.

Proses pencabutan embargo Amerika Serikat terhadap Vietnam juga dijalankan dalam kurun waktu yang singkat dan yang terpenting mekanisme ini dijalankan tanpa melibatkan pihak Vietnam. Dengan kata secara keseluruhan kebijakan luar negeri ini adalah merupakan inisiatif sepenuhnya dari Amerika Serikat. Beberapa proses/tahapan dalam hal ini, yaitu :

- a. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Hanoi, Vietnam melalui duta besarnya Ted Osius pada Oktober 2015 menyatakan bahwa tren kerja sama bidang sosial, ekonomi dan perdagangan kedua negara tumbuh rata-rata 6.7% per tahun, namun hal ini juga berlaku bagi kerja sama antara Vietnam dengan China dan Rusia.
- b. CIA dan *US Department of States* akan menindaklanjuti perkembangan hubungan Amerika Serikat dan Vietnam pada pertemuan akhir tahun 2015.
- c. Pada bulan Februari Kongres dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada level HoS (*House of Representatives*) bahwa direncanakan akan dibahas mengenai pencabutan embargo senjata atas Vietnam bersama dengan 16 isu internasional lainnya.
- d. Mei 2016 pencabutan embargo persenjataan Amerika Serikat terhadap Vietnam secara penuh.

Di akhir tahun 2015, Presiden Barack Obama sebagai *top person* menerima berbagai masukan dari faksi *warlord* dan *new patriot* bahwa kebijakan pencabutan embargo persenjataan atas Vietnam menjadi bagian penting mekanisme kebijakan luar negeri Amerika Serikat menjadi bagian dari *softpolicy* yang dapat memberikan keuntungan bagi Amerika Serikat dalam jangka menengah dan panjang. Hal ini kemudian dikenal dengan kebijakan *Buckpassing*.

Kebijakan *Buckpassing* Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Barack Obama diwujudkan karena adanya beberapa alasan dalam aspek ekonomi, politik dan keamanan. Ini sekaligus menegaskan bahwa, seperti halnya kebijakan *balancing*, implementasi kebijakan *buckpassing* juga didasari atas pertimbangan atau motivasi yang jelas. Menurut Anthony Coehnan dari *US Defense Institute* menyatakan bahwa :  
“...konsep ini (*buckpassing*) menjadi pilihan rasional bagi Amerika Serikat. Tidak seperti rezim-rezim sebelumnya dari Reagan hingga George W. Bush, saat ini (era kepemimpinan Obama) Amerika Serikat mengalami kondisi yang sangat berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Untuk itu, secara sadar pemerintahan Obama mengajak negara-negara sekutu untuk membangun imperium kekuatan yang lebih solid.”

Implementasi kebijakan *buckpassing* yang dijalankan oleh Amerika Serikat adalah untuk mendukung enam *grand design* bidang pertahanan, masing-masing yaitu :

1. Konsep pengamanan kolektif (*buckpassing*) wilayah pertama yang meliputi Eropa dengan menjadikan Uni Eropa dan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) sebagai sekutu yang dapat mengimplementasi stabilitas keamanan regional dan kepentingan Amerika Serikat.

2. Konsep pengamanan kolektif (*buckpassing*) wilayah kedua yang meliputi Asia Pasifik dengan menjadikan Australia dan ANZUS sebagai sekutu yang dapat mengimplementasi stabilitas keamanan regional dan kepentingan Amerika Serikat.
3. Konsep pengamanan kolektif (*buckpassing*) wilayah ketiga yang meliputi Asia Selatan dengan menjadikan Pakistan dan SAARC (*South Asian Association for Regional Cooperation*) sebagai sekutu yang dapat mengimplementasi stabilitas keamanan regional dan kepentingan Amerika Serikat.
4. Konsep pengamanan kolektif (*buckpassing*) wilayah keempat yang meliputi Timur-Tengah dengan menjadikan Arab Saudi, Bahrain dan beberapa negara sekutu Amerika Serikat sebagai aktor yang dapat mengimplementasi stabilitas keamanan regional dan kepentingan Amerika Serikat.
5. Konsep pengamanan kolektif (*buckpassing*) wilayah kelima yang meliputi Afrika dengan menjadikan Mesir, Mauritania, Sudan, Afrika Selatan dan beberapa negara sekutu Amerika Serikat sebagai aktor yang dapat mengimplementasi stabilitas keamanan regional dan kepentingan Amerika Serikat.
6. Konsep pengamanan kolektif (*buckpassing*) wilayah keenam yang meliputi Asia Timur dengan menjadikan Jepang dan Korea Selatan sebagai aktor yang dapat mengimplementasi stabilitas keamanan regional dan kepentingan Amerika Serikat.

Pencabutan embargo Amerika Serikat atas Vietnam tahun 2016 ternyata juga menggunakan momentum normalisasi hubungan Vietnam-Amerika Serikat tahun 1995. Pada masa ini, Presiden Bill Clinton menyatakan bahwa "...Vietnam akan menjadi patner penting Amerika Serikat di Asia Tenggara. Kami (pemerintah Amerika Serikat) akan segera mempertimbangkan pencabutan embargo, namun bukan sekarang. Kita semua mengharapkan dalam waktu yang segera."

Pernyataan Clinton ini kemudian menjadi isu yang pertama kali muncul dan dibahas pada sidang Kongres Amerika Serikat tahun 2015 yang diusulkan oleh Chris Van Hollen yang merupakan perwakilan dari kubu Demokrat dari wilayah Mariland. Pada sidang Kongres 9 Mei 2015 ini ternyata Hollen hanya memperoleh dukungan 32 anggota dari 435 anggota. Sebagian besar anggota Kongres menyatakan dukungan Amerika Serikat melalui HR 6111 yang ditandatangani oleh George W. Bush masih cukup efektif untuk membina hubungan baik dengan Vietnam.

Pada sidang Kongres Juli 2015 Chris Van Hollen kembali menyuarakan tentang re-orientasi hubungan Amerika Serikat dan Vietnam, namun disanggah oleh kubu Republik yang dipimpin oleh Bob Corker, namun dalam sidang ini kubu Demokrat berhasil memperoleh dukungan hingga 268 suara dari 435 total anggota. Angka ini termasuk dukungan dari beberapa tokoh Republik yang memang menganggap pencabutan embargo atas Vietnam perlu untuk dijalankan.

Pada sidang awal tahun 2006 (*first session of congress*) kemudian kubu Demokrat berhasil mencapai suara akumulatif sebesar 332 suara yang berarti telah mengantongi sekitar 71% suara di parlemen. Kemudian pada awal Februari parlemen mengadakan (*executive hearing*) dengan menghadirkan perwakilan *Departement of State*, *Departement of Defense* dan *National Security Council* yang menyatakan embargo persenjataan atas Vietnam bisa dicabut. Inilah yang mendasari sikap Obama untuk mencabut embargo atas Vietnam pada 23 Mei 2016.

### ***Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pencabutan Embargo Senjata Terhadap Vietnam***

Faktor yang mempengaruhi pencabutan embargo senjata terhadap Vietnam terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

#### ***1. Faktor Internal: Kapasitas Ekonomi dan Militer Amerika Serikat Dalam Pencabutan Embargo Persenjataan Terhadap Vietnam***

##### ***Aktor-aktor dan Pertimbangan pada Aspek Ekonomi.***

Aktor yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam mekanisme pencabutan embargo persenjataan atas Vietnam adalah perusahaan-perusahaan alutsista di negara ini. Analogi tentang kebijakan ini adalah jika Vietnam dicabut embargo maka dalam jangka pendek dan panjang akan terbangun dependensi yang nantinya dapat menguntungkan Amerika Serikat. Sehingga dengan dicabutnya embargo nantinya dapat mengembangkan pasar yang lebih luas. Politik luar negeri Amerika Serikat juga didukung oleh anggaran nasional yang luar biasa besar, yaitu Jangkauan global bidang perekonomian yang jumlahnya sebesar 14,3 triliun *US Dollar*.

Selain itu, terdapat juga jangkauan global ekonomi melalui bidang pertahanan yang jumlahnya sebesar 711 miliar *US Dollar*. Dibalik kemajuan ekonomi-politik Amerika Serikat ini ternyata terdapat kontribusi yang begitu besar dari industri-industri pertahanan Amerika Serikat yang pada periode 2013-2016 masih menduduki peringkat pertama dunia dengan 3,6 miliar *US Dollar* dengan tujuan ekspor India, Pakistan, Korea Selatan, Australia dan beberapa negara lainnya. Beberapa perusahaan tersebut yang dapat mewakili kapabilitas ekonomi yang berpengaruh terhadap proses pencabutan embargo persenjataan oleh Amerika Serikat atas Vietnam adalah sebagai berikut :

- a. *Lockheed Martin*
- b. *Boeing*
- c. *Raytheon*
- d. *Northrop Gruman*
- e. *General Dynamics*
- f. *United Technologies Corporation*

##### ***Aktor-aktor dan Pertimbangan pada Aspek Militer***

Arti penting tentang persenjataan Amerika Serikat sebagai kampiun alutsista dunia menjadi hal yang harus terus dikembangkan. Untuk itu, Amerika Serikat perlu mencabut embargo atas Vietnam. Sedangkan aktor-aktor yang terlibat sebagai bagian dari kapabilitas militer Amerika Serikat adalah organisasi-organisasi yang menaungi angkatan bersenjata, baik angkatan darat (*US Army*), angkatan laut (*US*

*Naval Force*) dan angkatan udara (*US Air Force*) dan satuan-satuan yang lebih kecil.

## **2. Faktor Eksternal: Konstelasi Internasional**

Pada era globalisasi, keberadaan politik luar negeri memiliki peranan yang penting dalam menentukan tingkat kemajuan suatu negara, bukan hanya pada negara dunia ketiga, namun juga negara maju. Hal ini tidak lepas dari adanya sebuah kondisi bahwa sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara sifatnya adalah terbatas, sedangkan kebutuhan suatu negara sifatnya adalah tidak terbatas.

Tujuan pokok (tujuan ideologis) dari politik luar negeri Amerika Serikat, baik secara konseptual ataupun kontekstual menurut Departemen Urusan Dalam Negeri Amerika Serikat (*United States Department of States*) adalah sebagai berikut :

*"...sesuai dengan tokoh pendiri negara ini (foundingfather) maka Amerika Serikat perlu berinteraksi dengan negara lain, bukan hanya untuk kepentingan domestik namun juga seluruh negara dunia. Tujuan politik luar negeri Amerika Serikat adalah untuk menciptakan lebih aman, demokratis dan sejahtera untuk kepentingan Amerika Serikat dan dunia."*

Tujuan praktis, dari politik luar negeri Amerika Serikat adalah seperti halnya dengan negara-negara lainnya di dunia, yaitu :

- a. Kontrol ekspor-impor.
- b. Langkah terdepan untuk membina hubungan baik dengan negara-negara dunia.
- c. Menjaga bisnis dan usaha, baik nasional ataupun swasta Amerika Serikat di luar negeri.
- d. Memberikan perlindungan bagi warga Amerika Serikat di luar negeri.

Pada saat proses pencabutan embargo senjata berlangsung Amerika Serikat sedang menghadapi tantangan global yang salah satunya adalah menjaga pengaruh khususnya di wilayah Asia Tenggara. Akan tetapi praktik *harddiplomacy* yang kerap di lakukan oleh rezim pemimpin AS sebelum masa kepemimpinan Obama menyebabkan menurunnya pengaruh AS di kawasan tersebut dan perlahan mulai di ambil alih oleh Republik Rakyat Cina yang berhasil memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang cukup signifikan.

Pengaruh RRC yang mendominasi bisa dilihat ketika negara– negara yang terlibat dalam sengketa kepulauan Spratly dan Paracel seakan tidak berdaya ketika wilayahnya diambil alih. Amerika Serikat dalam kepemimpinan Barack Obama memanfaatkan momentum mencabut embargo senjata bersamaan dengan semakin meningkatnya eskalasi konflik tersebut dalam rangka untuk kembali mendapatkan “teman” di wilayah Asia Tenggara dalam mengantisipasi dominasi RRC sekaligus berupaya mencapai kepentingan nasionalnya di kawasan Asia Tenggara sesuai dengan tujuan pokok maupun tujuan praktis AS.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan kebijakan luar negeri AS yang mencabut embargo senjata terhadap Vietnam berjalan melalui inisiasi eksekutif yang merupakan presiden AS Barack Obama dan dilanjutkan melalui kongres untuk disetujui menjadi sebuah regulasi kebijakan luar negeri. Pencabutan embargo persenjataan Amerika Serikat terhadap Vietnam yang merupakan bagian dari mekanisme pembuatan kebijakan luar negeri negara ini juga mempertimbangkan elemen-elemen dalam negeri, di antaranya partai politik pengusung pemerintah, kelompok perusahaan *armsales* yang tergabung dalam MIC (*military industrial complex*) hingga konstelasi politik luar negeri.

Pada masa kepemimpinan Barack Obama, Amerika Serikat memang berupaya mengembangkan kebijakan *softpower* yang berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, yaitu George W. Bush yang cenderung mengedepankan bentuk-bentuk kebijakan luar negeri yang bersifat *hardpower*. Ini juga tidak lepas dari kelompok pendukung masing-masing presiden yang memang berbeda, di mana Obama di dukung oleh kubu Demokrat yang cenderung kooperatif terhadap dunia internasional, sedangkan Bush di dukung oleh kubu Republik yang cenderung lebih keras terhadap dunia internasional untuk mempertahankan citra Amerika Serikat sebagai negara adikuasa. Untuk itulah, pemerintah Amerika sepakat untuk mencabut embargo atas Vietnam.

Kemudian dalam mekanisme pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, berkaitan dengan pencabutan embargo atas Vietnam juga berkaitan dengan pertimbangan ekonomi dan militer, yang diperkirakan perdagangan penjualan senjata terhadap Vietnam pasca pencabutan embargo akan menguntungkan Amerika Serikat dari sisi ekonomi dan juga menguntungkan Vietnam dalam meningkatkan pertahanan dan keamanan negaranya termasuk dalam menghadapi situasi konflik di Laut Cina Selatan yang cenderung meningkat.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Cecil V. Crabb and Gleen J. Antizo, 2000, *Congress and The Foreign Policy Process*, New York : LSU Press
- Christy, Neren, 2015, *The Handbook of US Soft Power*, New York : Routledge Publishing,
- Dawson, Christopher M, 2016, *Peacemaking and US Arms Sales Contradiction Issue*, Routledge Publishing, New York
- K.J. Holsti, 1984, *International Politics, A Framework for Analysis*, Third Edition, New Delhi: Prentice Hall of India
- Ohlam, Stephen, 2008, "US Between A New Athreatening", The Journal of Public Policy, New York

Wood, Brian, 2015, *The US Arms Sales and Manufacture : The Future of Nation Super Power*, Palgraff Publishing, London and New York

**SumberLain**

Why Obama Ended to Lethal Arms Embargo With Vietnam, Diolah oleh Neren Christy dalam  
[http://www.slate.com/articles/news\\_and\\_politics/war\\_stories/2016/05/why\\_obama\\_ended\\_the\\_lethal\\_arms\\_embargo\\_with\\_vietnam.html](http://www.slate.com/articles/news_and_politics/war_stories/2016/05/why_obama_ended_the_lethal_arms_embargo_with_vietnam.html), di akses pada tanggal 18 Oktober 2017

Obama Visit Vietnam and Japan”, dalam  
[http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/05/160523\\_dunia\\_vietnam\\_obama](http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/05/160523_dunia_vietnam_obama), diakses pada tanggal 17 Oktober 2017

Why is US Arming Vietnam”, dalam  
<http://edition.cnn.com/2016/05/23/politics/vietnam-arms-embargo-china/index.html>, di akses pada tanggal 15 Oktober 2017